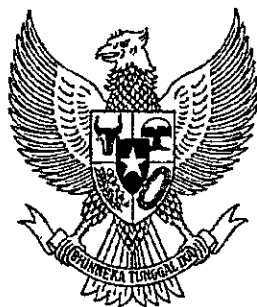




RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

**BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI**

Jalan Teuku Umar No. 12 Kode Pos 63211
Telp/Fax (0351) 749152, Email :
badankeuangan@ngawikab.go.id



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI, :

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf b dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan disempurnakan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 19, Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 275);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 disusun berpedoman pada:

- a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu; dan
- c. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Keuangan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD.

Pasal 4

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,
ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 2 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 98

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN KABUPATEN
NGAWI TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam prosesnya penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan harus berpedoman pada :

1. RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2012-2026;
2. Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi Renja PD Tahun lalu dan hasil evaluasi Renja PD tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kinerja;
4. Pedoman penyusunan Renja PD Kabupaten Ngawi Tahun 2025.

Renja PD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan, kegiatan pada tahap ini terdiri dari :
 - a. Pembentukan Tim Penyusun Renja PD yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan
 - b. Orientasi mengenai Renja PD
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renja PD.Penyusunan agenda kerja tim merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan Dokumen Renja PD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Renja PD.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan nikmatNya sehingga Badan Keuangan Kabupaten Ngawi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Keuangan Tahun 2025. Tak lupa pula shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

RenjaBadan Keuangan Tahun 2024adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Keuangan Tahun 2024disusun sesuaiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2024ini disadari masih terdapat kekurangan, namun seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan Kabupaten Ngawi berkomitmen dan berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja guna terwujudnya pengelolaan Keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib.

Demikian semoga bermanfaat.

Ngawi, 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN NGAWI



Dr. TRI PUJO HANDONO
Pembina Utama Muda
NIP. 196604091986021 002

- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan renja PD
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja ;
4. Perumusan rancangan akhir Renja; dan
5. Penetapan Renja dengan Peraturan Kepala Daerah.

Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Keuangan serta tugas lain yang diberikan Bupati sebagai berikut:

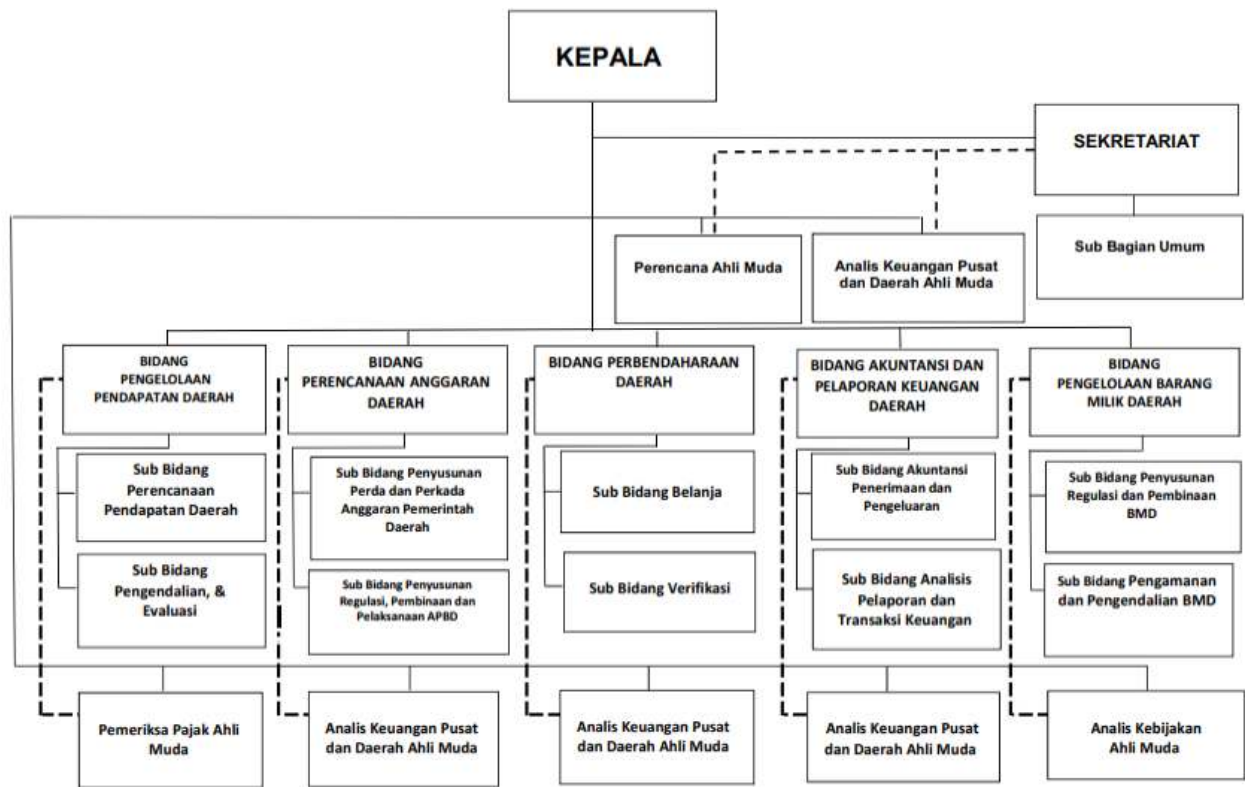
- a. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi pada Badan Keuangan;
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan keuangan dan barang milik daerah; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Badan Keuangan mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- c. penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. penyusunan rencana dan melaksanakan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah;
- e. penyusunan Ranperda dan Ranperbup tentang RAPBD dan PAPBD;
- f. penyusunan dan melaksanakan Kebijakan penatausahaan APBD;
- g. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD);
- h. penyusunan dan melaksanakan kebijakan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
- i. penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. penyusunan Ranperda dan Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- k. penyusunan Laporan semester I dan Prognosis 6 bulan berikutnya;
- l. melaksanakan Pemungutan pendapatan daerah dari sektor pajak dan mengkoordinasikan dan fasilitasi pendapatan daerah;

- m. melaksanakan koordinasi, pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan APBD;
- n. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
- o. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- p. melakukan penagihan piutang daerah;
- q. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- r. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah daerah;
- s. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- u. penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;

Susunan Organisasi Badan Keuangan yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. SOTK Badan Keuangan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Tahun 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang pembaruan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
32. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13.17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3);
 44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 94);
 45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 46. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 10);
 47. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 19);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 1);
52. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2022 Tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan;
53. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 25).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan.

Tujuan disusunnya Renja Badan Keuangan Tahun 2025 adalah :

1. Kerangka acuan dalam penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Renja Badan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu sebagaimana berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, Renja K/L, dan Renja PD Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun beqalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2008. disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan PD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/international, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

Berisikan penjelasan mengenai

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
- c. Rencana tindak lanjut;

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) yaitu Tahun Anggaran 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) yaitu Tahun Anggaran 2024, mengacu pada APBD Tahun berjalan. Pada Tahun 2023 pagu anggaran Rp. 506.373.627.883,00 mengampu 4 program, 14 kegiatan, 77 sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah

Berdasarkan target kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 secara umum sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang **tidak memenuhi** target kinerja yang direncanakan;
 - Program pengelolaan keuangan daerah dengan target 100 % dan realisasi 99,27 %
2. Realisasi program/kegiatan yang **telah memenuhi** target kinerja yang direncanakan;
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Realisasi program/kegiatan yang **melebihi** target kinerja yang direncanakan; tidak ada
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan
 - Realisasi sesuai kebutuhan dan kondisi tahun berjalan contoh untuk penerbitan SP2D melebihi target karena perubahan mekanisme (SP2D menunjuk by name) yaitu Bantuan Keuangan Siswa Miskin. SPD melebihi target karena ada pergeseran anggaran yang mengharuskan menerbitkan ulang SPD, pelaksanaan rekonsiliasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran karena refocusing makan ada yang tidak bisa dilaksanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD
 - Tingkat capaian program Renstra PD tidak optimal
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
 - Melakukan penyesuaian waktu pelaksanaan anggaran per bulan (anggaran kas) yang sudah ditetapkan.
 - Perubahan Renstra PD pasca ditetapkannya Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan monitoring dalam penyusunan target kinerja disesuaikan dengan pagu indikatif.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

N o	Kode	Urusan/Bidang/U rusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun n-3 (2021)			Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun n-2 (2022)						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah n-1) Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai dengan tahun berjalan					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2022)							Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisas i Target Renstra		
	1	2	3	4		5			6			7			8=7 /6	9			10 = 5+7+9			11=10/4	
				K	Rp	K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp		K	Rp			
					525,878, 838,349		473,218, 664,640						455,396, 327,349				468,558, 716,403						
	5.2.1	BADAN KEUANGAN	BADAN KEUANGAN	100	%	525,878, 838,349	100	%	473,218, 664,640	100	%	501,574,85 6,741	100	%	455,396, 327,349	91	100	%	468,558, 716,403			1,379,750,72 8,100	262%
	5.2 5.2.1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	100	%	22,420,4 76,089	100	%	37,061,7 45,969	100	%	22,213,336 ,697	100	%	13,780,5 89,739	1	100	%	23,297,5 44,988	100	%	56,851,361,4 04	
	5.2 5.2.1 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja OPD yang Disusun Tepat Waktu	100	%	225,975, 000	100	%	17,838,8 04,292	100	%	184,000,00 0	100	%	25,288,8 00	13.7 4%	100	%	163,741, 500			366,976,300	

	5.2 5.2.1 1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD yang Disusun	11	Dok ume n	19,244,0 00	22	Doku men	13,350,0 00	12	Doku men	14,000,000	12	Doku men	9,250,00 0	66.0 7%	11	Dok um en	22,392,0 00			44,992,000	234%
			Jumlah Dokumen Penganggaran OPD yang disusun	0	Dok ume n		4	Doku men		4	Doku men		4	Doku men			0	Dok um en				-	
	5.2 5.2.1 1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	2	Dok ume n	7,075,00 0											2	Dok um en	9,400,00 0			9,400,000	133%
	5.2 5.2.1 1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	4	Dok ume n	3,675,00 0											4	Dok um en	6,000,00 0			6,000,000	163%
	5.2 5.2.1 1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	2	Dok ume n	5,035,00 0											2	Dok um en	7,360,00 0			7,360,000	146%
	5.2 5.2.1 1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA -SKPD	4	Dok ume n	4,000,00 0											4	Dok um en	5,162,50 0			5,162,500	129%

	5.2 5.2.1 1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Dokumen Kinerja OPD yang disusun	6	Dok ume n	186,946, 000	12	Doku men	164,596, 000	6	Doku men	170,000,00 0	6	Doku men	16,038,8 00	9.43 %	6	Dok um en	113,427, 000			294,061,800	157%
			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan				1	Kali														-	
	5.2 5.2.1 1 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	18,276,1 44,759	100	%	17,660,8 58,292	100	%	19,368,940 ,697	100	%	11,261,2 49,709	58.1 4%	100	%	19,562,2 13,658	100	%	48,484,321,6 59	265%
	5.2 5.2.1 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	28	Dok ume n	18,269,2 07,759	28	Doku men	17,654,8 01,292	28	Doku men	19,361,659 ,497	28	Doku men	11,254,5 37,009	58.1 3%	28	Dok um en	19,555,2 76,658			48,464,614,9 59	265%
			Jumlah Dokumen Pengajuan Gaji dan Tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	1120	Dok ume n		112 0	Doku men		112 0	Doku men		112 0	Doku men			1120	Dok um en				-	
	5.2 5.2.1 1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan yang Disusun	48	Lapo ran	6,937,00 0	48	Lapora n	6,057,00 0	48	Lapora n	7,281,200. 00	48	Lapor an	6,712,70 0	92.1 9%	48	Lap ora n	6,937,00 0			19,706,700	284%
			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang di susun	2	Lapo ran		2	Lapora n		2	Lapora n		2	Lapor an			2	Lap ora n				-	

			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	48	Laporan											48	Laporan					-	
	5.2 5.2.1 1 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Disiplin dalam Setahun	100	%	303,173,500	100	%	195,577,100	100	%	249,600,000	100	%	322,333,850	129.14%	100	%	386,362,500	100	%	904,273,450	298%
	5.2 5.2.1 1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli/diadakan	0	Meter	79,521,000	255	Meter	82,421,000	240	Meter	89,600,000.00	240	Meter	68,215,050	76.13%	0	Meter	83,280,000			233,916,050	294%
			Jumlah Pakaian Batik yang di beli / diadakan	0	Potong		170	Potong		80	Potong		80	Potong			0	Potong				-	
			Jumlah Pakaian olah raga yang di beli / diadakan		Stel		85	Stel									Stel				-		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	3	Paket											3	Paket				-		
	5.2 5.2.1 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat / Sosialisasi / Bimtek	40	Orang	223,652,500	40	Orang	113,156,100	150	Orang	160,000,000	150	Orang	254,118,800	158.82%	40	Orang	303,082,500			670,357,400	300%
			Jumlah Diklat dan Pelatihan yang diadakan	1	Kali		1	Kali		2	Kali		2	Kali			1	Kali				-	

			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang		150	Orang									150	Orang				-	
	5.2 5.2.1 1 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	100	%	646,269,860	100	%	313,238,575	100	%	532,035,000	100	%	578,455,100	108.73%	100	%	639,841,360	100	%	1,569,342,535	243%
	5.2 5.2.1 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	100	%	10,783,360	100	%	11,971,700	100	%	15,000,000	100	%	5,309,000	35.39%	100	%	10,783,360			28,064,060	260%
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket												1	Paket				-	
	5.2 5.2.1 1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ATK	100	%	182,475,000	100	%	147,955,000	100	%	150,000,000	100	%	127,600,600	85.07%	100	%	182,475,000			458,030,600	251%
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	Paket			Paket									1	Paket				-	
	5.2 5.2.1 1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan yang disediakan			14,137,000			37,807,500	6000	Kotak	69,000,000	6000	Kotak	46,201,000	66.96%			14,137,000			98,145,500	694%
			Jumlah Minuman yang disediakan						300		Dus		300	Dus								-	
			Jumlah Air Isi Ulang ang disediakan						100		Galon		100	Galon								-	

			Jumlah Minuman yang disediakan						1500	Botol		1500	Botol								-	
			Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				2,300	Kotak													-	
			Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket											3	Paket				-	
	5.2 5.2.1 1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak			115,364,500	48,393	Lembar	60,861,000	50000	Lembar	65,000,000	50000	Lembar	112,595,000	173.22%		115,210,000			288,666,000	250%
			Jumlah Barang yang digandakan	50,000	Lembar		25	Lembar		50000	Lembar		50000	Lembar			50,000	Lembar			-	
			Jumlah Iklan / Publikasi Media Cetak							10	Kali		10	Kali							-	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket												10	Paket			-	
	5.2 5.2.1 1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar yang disediakan			153,891,000	36	Eksemplar	15,201,000	12	Eksemplar	63,035,000	12	Eksemplar	144,283,000	228.89%		126,211,000			285,695,000	186%
			Jumlah Buku Peraturan Perundang - undangan yang disediakan				12	Buku		5	Buku		5	Buku							-	
			Jumlah Paket Iklan yang disediakan				1	Paket													-	

			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang yang disediakan	5	Dokumen											5	Dokumen				-		
			Jumlah Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang Undangan yang diadakan	2	Kali											2	Kali				-		
	5.2 5.2.1 1.2.06.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	Laporan	10,300,000										24	Laporan	10,300,000			10,300,000	100%	
			Jumlah Mamin Kujungan Tamu yag disediakan	2000	Kotak											2000	Kotak				-		
	5.2 5.2.1 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar yang dihadiri / diikuti	40	Kali	159,319,000	40	Kali	77,249,875	200	Kali	170,000,000	200	Kali	142,466,500	83.80%	40	Kali	180,725,000			400,441,375	251%
			Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam yang dihadiri /diikuti							200	Kali		200	Kali							-		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan											200	Laporan				-		
			Jumlah Mamin Rapat SKPD yang disediakan	500	Kotak											500	Kotak				-		

	5.2 5.2.1 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan sesuai dengan Kebutuhan dalam Setahun	100	%	1,420,34 0,970	100	%	9,336,00 0	100	%	543,761,00 0	100	%	223,157, 000	41.0 4%	100	%	1,138,29 7,970	100	%	1,538,930,97 0	108%
	5.2 5.2.1 1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan yang disediakan	1	Unit	472,468, 000						313,761,00 0.00					1	Unit	472,468, 000			472,468,000	100%
	5.2 5.2.1 1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1	Unit	313,761, 000											1	Unit	313,761, 000			313,761,000	100%
	5.2 5.2.1 1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	7	Unit	25,883,0 00	5	Unit	9,336,00 0			25,000,000 .00					7	Unit	25,883,0 00			35,219,000	136%
	5.2 5.2.1 1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor yang Diadakan			575,633, 970			168,140, 000	30	Unit	180,000,00 0	30	Unit	195,270, 000	108. 48%			293,590, 970			657,000,970	114%
			Jumlah Mesin Absensi yang diadakan				1	unit														-	
			Jumlah Peralatan kerja yang Dibeli / diadakan				24	Unit														-	
			Jumlah Unit Peralatan Mesin Lainnya yang disediakan	31	Unit												31	Unit				-	

	5.2 5.2.1 1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diadakan			32,595,000				12	Unit	25,000,000.00	12	Unit	27,887,000	111.55%			32,595,000			60,482,000	186%
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	5	Unit												5	Unit				-	
	5.2 5.2.1 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Setahun	100	%	1,165,922,000	100	%	1,001,177,410	100	%	1,097,500,000	100	%	1,037,385,360	94.52%	100	%	1,129,118,000	100	%	3,196,772,770	274%
	5.2 5.2.1 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim			32,500,000	200	Surat	435,000	3000	Surat	2,500,000	3000	Surat	205,300	8.21%			2,500,000			3,140,300	10%
			Jumlah Laporan Jasa Surat Menurut	500	Laporan												500	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang di Bayarkan	12	rekening	451,703,000	12	rekening	492,512,410	12	Rekening	460,000,000	12	Rekening	435,803,710	94.74%	12	rekening	451,703,000			1,380,019,120	306%
			Jumlah Rekening Telepon yang di bayarkan (3x12)	12	Rekening		12	Rekening		36	Rekening		36	Rekening			12	Rekening				-	
			Jumlah Rekening Internet yang dibayarkan	12	rekening		12	rekening		12	Rekening		12	Rekening			12	rekening				-	
			Jumlah Rekening Air yang di bayarkan	12	rekening		12	rekening		12	Rekening		12	Rekening			12	rekening				-	

			Jumah Web Hosting yang dibayar	1	paket		1	paket		12	Rekening		12	Rekening			1	paket				-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	60	Laporan												60	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan yang dibeli	110	Buah	66,204,000			29,092,000	110	Buah	25,000,000	110	Buah	66,496,350	265.99%	110	Buah	59,400,000			154,988,350	234%
			Jumlah Bahan Kebersihan yang dibeli	148	Buah					148	Buah		148	Buah			148	Buah				-	
			Jumlah Pembayaran Jasa Kebersihan (3x 12)	18	orang/bulan		18	orang/bulan		36	orang/bulan		36	orang/bulan			18	orang/bulan				-	
			Jumlah Alat / bahan Kebersihan yang dibeli	103	Buah		103	Buah		103	Buah						103	Buah				-	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Laporan		36	Laporan		36	Laporan						36	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Honor (Jumlah Orang x Bulan)	150	OB	615,515,000.00	150	OB	508,230,000	114	OB	610,000,000.00	114	OB	534,880,000	87.69%	150	OB	615,515,000.00			1,658,625,000	269%
			Jumlah Pembayaran Lembur (JUmlah Orang x Hari)	21168	OJ		21168	OJ		17712	OJ		17712	OJ			21168	OJ				-	

			Jumlah Benda Pos / Materai yang Diadakan	816	Bua h		816	Buah		816	Buah		816	Buah		816	Bua h				-		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lapo ran											12	Lap ora n				-		
	5.2 5.2.1 1 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dalam setahun	100	%	382,650, 000	100	%	42,754,3 00	100	%	237,500,00 0	100	%	332,719, 920	140. 09%	100	%	277,970, 000	100	%	790,743,720	207%
	5.2 5.2.1 1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Jabatan			62,000,0 00			39,489,5 00	1	Unit	45,000,000. 00	1	Unit	31,586,3 20	70.1 9%			62,000,0 00			133,075,820	215%
			Jumlah Kendaraan Jabatan yang dibayar Pajaknya							2	Unit/ Tahun		2	Unit/ Tahun							-		
			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan				1	unit/ tahun													-		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di bayar Pajaknya				1	unit													-		

			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang diPelihara dan di bayar Pajaknya	1	Unit											1	Unit					-	
	5.2 5.2.1 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional			68,900,000	1	Unit / Tahun	42,754,300	4	Unit / Tahun	52,500,000.00	4	Unit / Tahun	52,809,900	100.59%			68,900,000			164,464,200	239%
			Jumlah Kendaraan Dinas / Opersional yang Dibayar Pajaknya				39	unit		31	Unit		31	Unit								-	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan Perizinannya	44	Unit											44	Unit					-	
	5.2 5.2.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	15	Unit	8,000,000						15,000,000.00				15	Unit	15,000,000			15,000,000	188%	
	5.2 5.2.1 1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan Kerja			23,750,000			7,885,000	55	Kali	25,000,000.00	55	Kali	60,625,000	242.50%			32,070,000			100,580,000	423%
			Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara				45	Kali														-	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	47	Unit											47	Unit					-	

	5.2 5.2.1 1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luasan Gedung Kantor yang dipelihara			220,000,000			89,925,000	300	M2	100,000,000.00	300	M2	187,698,700	187.70%			100,000,000			377,623,700	172%
			Jumlah Perbaikan dan Penataan Ruang yang dilaksanakan				1	Paket														-	
			Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / Direhabilitasi	4	Unit											4	Unit					-	
	5.2 5.2.1 2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat Waktu	100	%	500,090,314,760	100	%	433,029,808,881	100	%	476,098,472,544	100	%	437,914,699,841	91.98%	100	%	441,893,123,915	100	%	1,312,703,171,637	262%
	5.2 5.2.1 2 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu	100	%	1,324,039,000	100	%	1,111,948,400	100	%	1,268,648,900	100	%	1,969,696,193	155.26%	100	%	999,965,500	100	%	3,947,149,093	298%
	5.2 5.2.1 2.2.01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	46	Dokumen	98,181,500			101,242,000	94	Dokumen	241,820,000.00	94	Dokumen	79,555,000	32.90%	46	Dokumen	99,351,000			280,148,000	285%
			Persentase Belanja Pendidikan							20	%		20	%								-	
			Persentase Belanja Kesehatan							10	%		10	%								-	
			Jumlah Koordinasi dengan SKPD	4	Kali					4	Kali		4	Kali			4	Kali				-	
			Jumlah Dokumen KUA yang disusun				1	Dokumen														-	

			Jumlah Dokumen PPAS yang disusun				1	Doku men														-	
	5.2 5.2.1 2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	46	Dok ume n	99,084,0 00			58,437,3 00	94	Doku men	57,405,500. 00	94	Doku men	66,962,5 00	116. 65%	46	Dok um en	99,084,0 00			224,483,800	227%
			Persentase Belanja Pendidikan							20	%		20	%								-	
			Persentase Belanja Kesehatan							10	%		10	%								-	
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	4	Kali					4	Kali		4	Kali			4	Kali				-	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA yang disusun				1	Doku men														-	
			Jumlah Dokumen Perubahan PPAS yang disusun				1	Doku men														-	
	5.2 5.2.1 2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD yang disusun				94	Doku men	7,440,00 0	47	Doku men	22,550,000. 00	47	Doku men	8,602,50 0	38.1 5%						16,042,500	
			Jumlah Dokumen RKA SKPD yang diVerifikasi				94	Doku men														-	
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD							6	Kali		6	Kali								-	

	5.2 5.2.1 2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD yang disusun						8,835,00 0	235	Doku men	31,850,000. 00	235	Doku men	26,163,0 00	82.1 4%						34,998,000	
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD							6	Kali		6	Kali								-	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun				94	Doku men														-	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang diVerifikasi				94	Doku men														-	
	5.2 5.2.1 2.2.01.5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang diVerifikasi													92	Dok um en	20,550,0 00					
	5.2 5.2.1 2.2.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang diVerifikasi													92	Dok um en	31,700,0 00					
	5.2 5.2.1 2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen Perda dan Perbup APBD)			478,003, 500			615,658, 500	2	Doku men	499,011,00 0.00	2	Doku men	1,131,99 8,100	226. 85%			495,246, 500			2,242,903,10 0	469%
			Jumlah Dokumen Informasi Keuangan Daerah yang Dapat diAkses Publik	1	Dok ume n					1	Doku men		1	Doku men			1	Dok um en				-	
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	4	Kali					4	Kali		4	Kali			4	Kali				-	

			Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen											2	Dokumen				-	
			Jumlah Pemeliharaan Jaringan Server yang dilaksanakan						1	Paket			1	Paket							-	
			Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	46	Dokumen											46	Dokumen				-	
			Jumlah Perbup APBD yang disusun dalam 1 tahun				1	Dokumen													-	
			Jumlah Perda APBD yang disusun dalam 1 tahun				1	Dokumen													-	
	5.2 5.2.1 2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup APBD yang disusun			648,770,000			320,335,600	9	Dokumen	359,920,400.00	9	Dokumen	656,415,093	182.38%			222,863,500		1,199,614,193	185%
			Jumlah Dokumen Informasi Keuangan Daerah yang dapat diAkses Publik	1	Dokumen					1	Dokumen			1	Dokumen			1	Dokumen		-	
			Jumlah Koordinasi dengan SKPD	4	Kali					4	Kali			4	Kali			4	Kali		-	
			Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	46	Dokumen											46	Dokumen				-	

			Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	8	Dokumen											8	Dokumen					-	
			Jumlah Pemeliharaan Aplikasi yang dilaksanakan						3	Kali		3	Kali									-	
			Jumlah Perbup Peraturan APBD yang disusun dalam 1 tahun				1	Dokumen														-	
			Jumlah Perda Perubahan APBD yang disusun dalam 1 tahun				1	Dokumen														-	
	5.2 5.2.1 2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan						4	Dokumen	56,092,000.00					4	Kali	31,170,500				31,170,500	
			Jumlah Dokumen SBU yang disusun						2	Kali						2	Dokumen					-	
	5.2 5.2.1 2.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan Tepat Waktu	100	%	854,229,500	100	%	902,339,000	100	%	794,229,500	100	%	667,151,361	84.00%	100	%	829,229,500	100	%	2,398,719,861	281%
	5.2 5.2.1 2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Posisi Kas Harian yang disusun	264	Laporan	153,213,500	264	Laporan	496,573,000	264	Laporan	131,478,000	246	Laporan	237,886,500	180.93%	264	Laporan	153,213,500			887,673,000	579%
			Persentase SILPA Terhadap APBD	0.7	%					1	%		10	%			0.7	%				-	

	5.2 5.2.1 2.2.02.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	1	Laporan	5,580,000	2	Laporan	810,000			5,580,000					1	Laporan	5,580,000			6,390,000	115%
			Persentase SILPA Terhadap APBD	6.7	%												6.7	%				-	
	5.2 5.2.1 2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah SP2D yang diterbitkan			410,478,000	14300	Surat	349,609,500	15,500	Surat	397,398,500	18,889	Surat	283,440,500	71.32%			385,478,000			1,018,528,000	248%
			Jumlah SPD yang diterbitkan				282	Surat		305	Laporan		306	Laporan								-	
			Jumlah SPM yang diteliti				14300	Surat		15500	Surat		18889	Surat								-	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	28184	Dokumen												28184	Dokumen				-	
	5.2 5.2.1 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Transfer yang disusun			22,857,000	50	Laporan	7,883,000	35	Laporan	32,355,000	37	Laporan	11,023,500	34.07%			22,857,000			41,763,500	183%
			Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer) yang disusun				4	Laporan		4	Laporan		4	Laporan								-	

			Jumlah Dokumen Hasil ,Fasilitasi,Asistensi,Sinkronisasi,Supervisi,Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	42	Dokumen											42	Dokumen				-	
	5.2 5.2.1 2.2.02.6	Koordinasi , Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4	Dokumen	3,022,500										4	Dokumen	3,022,500			3,022,500	100%
	5.2 5.2.1 2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Gaji			83,813,000	14	Kali	43,053,500	12	Kali	195,014,000	12	Kali	112,913,861	57.90%		83,813,000			239,780,361	286%
			Jumlah Laporan Kas Mingguan				48	Laporan													-	
			Jumlah Pembinaan SKPD				4	Kali		4	Kali		4	Kali							-	
			Jumlah Rekonsiliasi gaji				12	Kali		12	Kali		12	Kali							-	
			Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD							26	%		26	%							-	
			Jumlah Dokumen Juknis / Sisdur Penatausahaan yang disusun							1	Dokumen		0	Dokumen							-	

			Jumlah laporan Kas dan Perkiraan Belanja yang disusun						12	Doku men		12	Doku men								-	
			Jumlah SKPP yang diterbitkan				525	Surat	750	Surat		690	Surat								-	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Adearah, Laporan Aliran Kas , dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan pihak ke tiga (PFK) dan Laporan hasil Koordinasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alisan Kas dan Pelaksanaan Pemungutan / Potongan dan Penyetoran Perhiyingan Pihak Ke tiga (PFK)	478	Lapo ran											478	Lap ora n				-	
	5.2 5.2.1 2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan			28,579,000	8	Kali	4,410,000	4	Kali	32,404,000	4	Kali	21,887,000	67.54%		28,579,000			54,876,000	192%
			Jumlah Rekonsiliasi DTH/RTH yang dilaksanakan				13	Kali		12	Kali		12	Kali							-	
			Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan				264	Kali		264	Kali		246	Kali							-	
			Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan				8	Kali		4	Kali		4	Kali							-	

			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pwngeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	270	Dokumen											270	Dokumen					-	
			Jumlah Rekonsiliasi dengan SKPD	4	Kali											4	Kali					-	
	5.2 5.2.1 2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Yang Mengikuti Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	188	Orang	146,686,500										188	Orang	146,686,500				146,686,500	100%
			Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	2	Kali											2	Kali					-	
	5.2 5.2.1 2.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun tepat Waktu dan Sesuai SAP	100	%	984,475,000	100	%	608,297,200	100	%	945,275,000	100	%	1,131,461,500	119.70%	100	%	984,475,000	100	%	2,724,233,700	277%
	5.2 5.2.1 2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Koordinasi Akuntansi Penerimaan Kas Daerah yang dilaksanakan			108,430,000	12	Kali	61,806,500	168	Kali	121,955,000.00	168	Kali	245,475,000	201.28%			108,430,000			415,711,500	383%
			Jumlah Koordinasi Akuntansi Pengeluaran Kas Daerah yang dilaksanakan				13	Kali		564	Kali		564	Kali								-	
			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	16000	Kali		12	Kali		16,000	Kali		16,000	Kali			16000	Kali				-	

			Jumlah Laporan Koordinasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	144	Lap ora n											144	Lap ora n				-		
	5.2 5.2.1 2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Rekonsiliasai Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan yang dilaksanakan			125,222,000			84,294,500	612	Kali	122,670,000.00	612	Kali	175,160,000	142.79%			125,222,000			384,676,500	307%
			Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasai Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan				94	Kali													-		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,Belanja, Pembiayaan , Pendapatan -LO dan Beban	732	Dok ume n											732	Dok um en				-		
	5.2 5.2.1 2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawabana Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran	Jumlah Koordnasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			127,518,000	8	Kali	54,528,200			140,620,000.00							127,518,000			182,046,200	143%
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan Triwulan dan Semesteran yang disusun	18	Kali											18	Kali				-		
	5.2 5.2.1 2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun			39,550,000	47	Lapor an	182,829,000	67	Lapora n	-	67	Lapor an	114,333,000	0.00%			39,550,000			336,712,000	851%

			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan , Triwulan dan semesteran yang disusun						170	Lapora n		170	Lapor an								-	
			Persentase Program Kegiatan yang Tidak dilaksanakan	10	%				10	%		10	%			10	%				-	
			Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	1	%				1	%		1	%			1	%				-	
			Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0.1	%				0.1	%		0.1	%			0.1	%				-	
			Jumlah Publikasi yang Dilaksanakan untuk Transparasi Publik	2	Kali				1	Kali		1	Kali			2	Kali				-	
			Jumlah Dokumen yang Dapat diakses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	1	Dok ume n				1	Doku men		1	Doku men			1	Dok um en				-	
			Jumlah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang disusun																		-	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD , BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerahyang Terkonsolidasi	134	Lapo ran											134	Lap ora n				-	

	5.2 5.2.1 2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Ranperbup Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab yang disusun	9	Dok ume n	159,438, 000			93,165,5 00	9	Doku men	169,302,00 0.00	9	Doku men	161,618, 000	95.4 6%	9	Dok um en	159,438, 000				414,221,500	260%
			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang - undangan				12	Kali														-		
	5.2 5.2.1 2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaba n Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang Disusun	2	Dok ume n	107,014, 000				2	Doku men	44,776,000. 00	2	Doku men	80,647,0 00	180. 11%	2	Dok um en	107,014, 000				187,661,000	175%
	5.2 5.2.1 2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	5	Dok ume n	171,339, 000			131,673, 500	5	Doku men	109,758,00 0.00	5	Doku men	184,001, 000	167. 64%	5	Dok um en	171,339, 000				487,013,500	284%
			Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan				2	Kali														-		
	5.2 5.2.1 2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaba n Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan	1	Kali	145,964, 000				3	Kali	236,194,00 0.00	3	Kali	170,227, 500	72.0 7%	1	Kali	145,964, 000				316,191,500	217%

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	60	Orang											60	Orang					-	
	5.2 5.2.1 2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelaksanaan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam setahun	100	%	496,624,805,760	100	%	430,407,224,281	100	%	473,065,319,144	100	%	434,146,390,787	91.77%	100	%	438,776,688,415	100	%	1,303,330,303,483	262%
	5.2 5.2.1 2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang Mendapatkan ADD	213	Desa	480,388,922,945	852	Desa	415,904,909,000	852	Desa	452,909,660,847.69	852	Desa	425,157,411,200	93.87%	213	Desa	422,540,805,600			1,263,603,125,800	263%
			Jumlah Desa yang Mendapatkan SARPRAS	213	Desa		213	Desa		213	Desa		213	Desa			213	Desa				-	
			Jumlag Desa yang Mendapatkan Bantuan Keuangan BINA MITRA				5	Desa		9	Desa		9	Desa								-	
			Jumlah RT yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	5616	RT		5604	RT		5616	RT		5616	RT			5616	RT				-	
			Jumlah RW yang Mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW	1211	RW		1212	RW		1211	RW		1211	RW			1211	RW				-	
			Jumlah Laporan Bantuan Keuanganyang disusun							1452	Dokumen		1452	Dokumen								-	
			Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	1	%					1	%		1	%			1	%				-	
			Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek							213	Orang		213	Orang								-	

			Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	852	Lap ora n											852	Lap ora n				-		
			Jumlah Desa yang Mendapatkan DD				426	Desa													-		
	5.2 5.2.1 2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	10	Dok ume n	6,834,24 7,670	60	Doku men	3,970,47 8,475	12	Doku men	11,411,630 ,000.00	12	Doku men	987,732, 715	8.66 %	10	Dok um en	6,834,24 7,670			11,792,458,8 60	173%
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10	Lapo ran												10	Lap ora n			-		
	5.2 5.2.1 2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah SP2D yang Diterbitkan	10	Dok ume n	9,401,63 5,145	426	Doku men	10,531,8 36,806	213	Doku men	8,744,028, 296.50	213	Doku men	8,001,24 6,872	91.5 1%	10	Dok um en	9,401,63 5,145			27,934,718,8 23	297%
			Persentase Jumlah Bagi Hadil Kab/ Kota dan desa yang Dikelola	100	%					100	%		100	%			100	%			-		
	5.2 5.2.1 2 2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan	Persentase Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkungan Keuangan yang dilaksanakan	100	%	302,765, 500						25,000,00 0					100	%	302,765, 500	100	%	302,765,500	100%
	5.2 5.2.1 2 2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jum lah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dok ume n	241,765, 500						25,000,000 .00					1	Dok um en	241,765, 500			241,765,500	100%
	5.2 5.2.1 2 2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	65	Ora ng Pere ncan an SKP D	61,000,0 00											65	Ora ng Per enc ana n SKP D	61,000,0 00			61,000,000	100%

			Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota	213	Ora ng Perencanan Desa												213	Ora ng Perencana n Desa				-	
	5.2 5.2.1 3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Kategori Tertib	100	%	1,100,838,500	100	%	721,953,040	100	%	1,065,838,500	100	%	1,292,932,955	121.31%	100	%	1,100,838,500	100	%	3,115,724,495	283%
	5.2 5.2.1 3.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan / Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat Waktu	100	%	1,100,838,500	100	%	721,953,040	100	%	1,065,838,500	100	%	1,292,932,955	121.31%	100	%	1,100,838,500	100	%	3,115,724,495	283%
	5.2 5.2.1 3.2.01.01	Penyusunan Standart Harga	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali	159,053,000										1	Kali	159,053,000			159,053,000	100%	
			Jumlah SKPD yang Menyampaikan Usulan SSH	47	SKPD											47	SKPD				-		
			Jumlah Standart Harga yang disusun	2	Dokumen											2	Dokumen				-		
	5.2 5.2.1 3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah SKPD yang Menyampaikan RKBMD	46	SKPD	51,480,500	47	SKPD	23,294,000	47	SKPD	184,800,000	47	SKPD	230,418,300	124.69%	46	SKPD	51,480,500			305,192,800	593%
			Jumlah SK Penetapan Status Penggunaan yang disusun				47	SKPD		47	SK	-	47	SK							-		
			Jumlah Dokumen Pengajuan Usulan Pemanfaatan BMD yang dilaksanakan				1	Dokumen		2	Dokumen	-	2	Dokumen							-		
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali					6	Kali		6	Kali			1	Kali				-	
			Jumlah SKPD yang Menyampaikan Usulan SSH							47	SKPD		47	SKPD							-		

			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	46	Dokumen											46	Dokumen				-	
	5.2 5.2.1 3.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Program	96,162,000										1	Program	96,162,000			96,162,000	100%
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali											1	Kali				-	
	5.2 5.2.1 3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Inventarisasi Jenis BMD yang dicatat			175,148,500	6	Laporan	296,878,700	6	Laporan	249,000,000	6	Laporan	493,991,455	198.39%		175,148,500			966,018,655	552%
			Jumlah Daftar Aset Tetap yang disusun							6	Dokumen		6	Dokumen							-	
			Jumlah Dokumen Manual Untuk Penyusunan Daftar Aset Tetap							1	Dokumen		1	Dokumen							-	
			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali											1	Kali				-	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2	Laporan											2	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali	46,162,000										1	Kali	46,162,000			46,162,000	100%
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	1	Laporan											1	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengamanan BMD yang dilaksanakan			241,514,500	2	Laporan	182,948,840	4	Laporan	266,878,500	4	Laporan	276,038,200	103.43%		241,514,500			700,501,540	290%
			Jumlah Dokumen Asli Kepemilikan BMD yang disimpan	2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen		2	Dokumen				-	
			Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali					6	Kali		6	Kali		1	Kali				-	

			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	2	Lap ora n											2	Lap ora n				-		
	5.2 5.2.1 3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Usulan Penghapusan yang ditindaklanjuti			105,179,000			151,076,000	30	Doku men	246,000,000	30	Doku men	164,888,200	67.03%			105,179,000			421,143,200	400%
			Jumlah Dokumen Usulan Pemindahtanganan yang dilaksanakan				2	Doku men		5	Doku men		5	Doku men								-	
			Jumlah Dokumen Usulan Penghapusan yang dilaksanakan				15	Doku men														-	
			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparansi dan Partisipasi Publik	2	Kali					3	Kali		3	Kali			2	Kali				-	
			Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali					6	Kali		6	Kali			1	Kali				-	
			Jumlah Dokumen Hasil Optomalisasi Penggunaan , Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1	Dok ume n											1	Dok um en				-		
	5.2 5.2.1 3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	4	Kali	55,361,500	2	Kali	67,755,500	9	Kali	119,160,000	9	Kali	127,596,800	107.08%	4	Kali	55,361,500			250,713,800	453%
			Jumlah rekonsiliasi Inventarisasi Aset Tahunan yang dilaksanakan							9	Kali		9	Kali								-	
			Jumlah Dokumen Nilai Aset yang disusun							6	Doku men		6	Doku men								-	

			Jumlah Koordinasi dengan SKPD	1	Kali					8	Kali			8	Kali			1	Kali				-	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan												4	Laporan				-		
	5.2 5.2.1 3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali	52,408,500											1	Kali	52,408,500			52,408,500	100%	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	2	Laporan												2	Laporan				-		
	5.2 5.2.1 3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	1	Kali	118,369,000											1	Kali	118,369,000			118,369,000	100%	
			Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	76	Orang												76	Orang				-		
			Jumlah SKPD yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan dilaksanakan	46	SKPD												46	SKPD				-		
	5.2 5.2.1 4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap APBD	100	%	2,267,209,000	100	%	2,405,156,750	100	%	2,197,209,000	100	%	2,408,104,814	109.60%	100	%	2,267,209,000	100	%	7,080,470,564	312%	
	5.2 5.2.1 4 2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD dibanding tahun Sebelumnya	100	%	2,267,209,000	100	%	2,405,156,750	100	%	2,197,209,000	100	%	2,408,104,814	109.60%	100	%	2,267,209,000	100	%	7,080,470,564	312%	
	5.2 5.2.1 4.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Perencanaan Pendapatan	10	Kali	93,748,000	1	Kali	181,779,000	10	Kali	70,930,000.00	10	Kali	36,349,000	51.25%	10	Kali	93,748,000			311,876,000	333%	
			Jumlah Pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan	2	Kali		2	Kali		2	Kali		2	Kali			2	Kali				-		

			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	8	Dokumen											8	Dokumen				-	
			Jumlah Survey Potensi Pajak Daerah				1	Kali													-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	35	Orang	89,873,000.00			166,840,000	35	Orang	72,332,000.00	35	Orang	29,047,900	40.16%	35	Orang	89,873,000.00		285,760,900	318%
			Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Daerah yang dilaksanakan				2	Kali		3	Kali		3	Kali							-	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kewajiban Pajak Daerah	3	Dokumen											3	Dokumen				-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.3	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12	Laporan	20,338,000										12	Laporan	-			-	0%
			Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	12	Kali											12	Kali				-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah yang disurvey			1,031,411,000			33,245,000	1000	Wajib Pajak	84,960,000.00	1000	Wajib Pajak	14,320,000	16.85%			20,338,000		67,903,000	7%
			Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata dan didaftarkan							1500	Obyek Pajak		1500	Obyek Pajak							-	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah				3	Dokumen													-	

			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah , Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	Laporan											12	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Monitoring Pendapatan daerah dan PBB yang Dilaksanakan			10,765,000	19	Kali	9,096,000	12	Kali	12,340,000.00	12	Kali	12,320,000	99.84%			10,765,000		32,181,000	299%
			Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah Yang dilaksanakan				12	Kali		12	Kali		12	Kali							-	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan , Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12	Laporan											12	Laporan				-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Aplikasi Pajak Daerah yang dipelihara				1	Aplikasi	1,185,451,000	3	Aplikasi	992,863,000.00	3	Aplikasi	977,882,100	98.49%			1,031,411,000		3,194,744,100	
			Jumlah DHKP,SPPT,dan SKPD yang dicetak				10	Box		652460	Lembar		652460	Lembar							-	
			Jumlah Himbauan Pajak yang dicetak				1	Lembar		1000	Lembar		1000	Lembar							-	
			Jumlahn Obyek Pajak yang ditetapkan				66000	Wajib Pajak		630138	OP		630138	OP							-	
			Jumlah Pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan				2	Kali		2	Kali		2	Kali							-	
			Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan				640750	OP													-	
			Jumlah SPPT dan SKPD yang dicetak				1091750	Lembar													-	
			Jumlah Dokumen Ketetaoan Pajak Daerah	3	Dokumen											12	Dokumen				-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Konsultasi Pajak Daerah yang Dilaksanakan			34,867,000	4	Kali	12,455,000	4	Kali	39,790,000.00	4	Kali	4,063,000	10.21%			34,867,000		51,385,000	147%

			Jumlah Pendampingan Pajak Daerah				4	Kali														-	
			Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	40	Layanan											40	Layanan					-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Deviasi realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD yang Disusun tepat Waktu	0.8	%	96,635,000			65,540,500	1.95	%	81,113,000	1.95	%	271,306,500	334.48%	0.8	%	96,635,000			433,482,000	449%
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	7	Dokumen											7	Dokumen					-	
			Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan tepat Waktu				12	Laporan														-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi/ Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan			179,706,000	195	Kali	169,767,550	240	Kali	160,218,000	240	Kali	262,610,000	163.91%			179,706,000			612,083,550	341%
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Peangihan Pajak Daerah	240	Dokumen											240	Dokumen					-	
	5.2 5.2.1 4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan			709,866,000	24	Laporan	580,982,700	12	Laporan	682,663,000	12	Laporan	800,206,314	117.22%			709,866,000			2,091,055,014	295%
			Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang Di Publikasikan di Wabsite							1	Dokumen		1	Dokumen								-	
			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan uantuk Transparasi dan Partisipasi Publik							5	Kali		5	Kali								-	

		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	8	Dok ume n				5	Kali		5	Kali			8	Dok um en				-	
--	--	---	---	-----------------	--	--	--	---	------	--	---	------	--	--	---	-----------------	--	--	--	---	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kondisi target dan capaian kinerja dapat diketahui dengan menggunakan analisa dan metode SWOT sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan) Internal

- a. Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)yaitu kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
- b. Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” berturut-turut atas LKPD Tahun 2013-2023. Hal ini menjadi pemacu dan pemicu peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah ke depannya agar selalu optimal, terukur, akuntabel, transparan dan *reliable*;
- c. Memilki sarana Prasarana dan Sistem Informasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi.

2. Weaknesses (Kelemahan), Internal

- a. Perubahan Regulasi dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
- b. Terbatasnya sumber daya aparatur dibandingkan dengan beban kerja.

3. Opportunities (Peluang) External

- a. Tugas pokok dan Fungsi strategis dalam rangka fasilitas SKPD melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

4. Treats (ancaman) external

- a. SKPD yang sering terlambat menyampaikan laporan keuangan
- b. Banyaknya sumber daya aparatur yang memasuki masa purna tugas/ pensiun (MPP) sehingga diperlukan adanya tambahan pegawai baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya.
- c. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi Peraturan Perundang-undangan yang kurang memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang berkembang

Kinerja Perangkat Daerah di analisis berdasarkan jenis indikator yang ditetapkan pada masing-masing program kegiatan sesuai tugas pokok fungsi. Mendasar pada Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan, Badan Keuangan dipimpin oleh Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan. Didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) keseluruhan sejumlah 83 (Delapan Puluh Tiga) orang. Untuk

mengevaluasi Kinerja dilakukan evaluasi atas ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Mendasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, indikator kinerja yaitu Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun
2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), indikator kinerja yaitu Persentase PAD terhadap APBD
3. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, indikator kinerja yaitu Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib
4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah indikator kinerja yaitu Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib

Kinerja Badan Keuangan secara keseluruhan telah memenuhi target yang direncanakan sebagaimana dilihat di tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Ngawi

Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah			80,25	89,35	89,45	89,5	89,35	-	89,45	89,5	
2	Persentase PAD terhadap APBD		Persentase PAD terhadap APBD	12,05%	12,66%	13,08%	13,52%	12%	-	13,08%	13,52%	
3	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib		-	98,00%	98,25%	98,50%	99,00%	100%		98,50%	99,00%	
			Persentase Belanja Pendidikan	20%	20%	20%	20%	20%	-	20,00%	20,00%	

			Persentase Belanja Kesehatan	10%	10%	10%	10%	10%	-	10,00%	10,00%	
			Persentase SILPA (sudah termasuk jumlah laporan silpa)	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	-	6,70%	6,70%	
			Persentase SILPA terhadap APBD	15%	15%	15%	15%	3%	-	15,00%	15,00%	
			Persentase Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	25%	25%	25%	25%	25%	-	25,00%	25,00%	
			Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
			Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	WTP	WTP	
			Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana	10%	10%	10%	10%	10%	-	10,00%	10,00%	

			Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	1%	1%	1%	1%	1%	-	1,00%	1,00%	
			Rasio anggaran sisa thd total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,05%	-	0,10%	0,10%	
			persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,74%	-	1,00%	1,00%	
			Persentase Jumlah Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa yang dikelola	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	
			Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	-	0,86%	0,86%	
			Transparansi dan Partisipasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	

			Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	-	100,00%	100,00%	
2	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	-	-	95,10%	95,15%	95,20%	95,25%	95%		95,20%	95,25%	
		-	Manajemen Aset	95,03%	95,05%	95,10%	95,10%	95,01%	17,08%	95,10%	95,10%	
		-	Transparansi dan Partisipasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	
		-	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	80%	99%	100,00%	100,00%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan kondisi, atau permasalahan yang bersifat mendesak dan harus diperhatikan, atau diutamakan dalam merancang pembangunan, karena dampaknya signifikan baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan. Isu strategis, disusun melalui identifikasi permasalahan pembangunan yang ada di Kabupaten Ngawi. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara etika birokrasi. Secara konseptual, isu strategis, memiliki kemungkinan bahwa belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah pada suatu saat nanti. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi masalah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Ngawi pada tahun 2024.

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan, namun ada hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah yang perlu diperhatikan antara lain yaitu :

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi
 2. Penyerapan anggaran yang tidak tepat waktu
 3. Laporan Keuangan harus disajikan tepat waktu
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
 1. Belum optimalnya penggunaan SIPD
 2. Belum optimalnya pengawalan kinerja Perangkat Daerah dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan
 3. Opini BPK WTP terus dipertahankan
 4. Memaksimalkan potensi daerah untuk peningkatan PAD
 - c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Visi Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu 'SEMESTA BERENCANA' Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Mandiri, Berakhlak, Makmur dan Berdaya Saing berbasis Agropolitan dengan semangat Gotong Royong dalam bingkai NKRI. Badan Keuangan Mengampu Misi ke tiga 'Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima' dengan indikator sasaran yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.15.3 – 387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran IPKD Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah sejauh ini telah memenuhi target yang ditetapkan namun belum bisa memberikan hasil terhadap pencapaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah ditetapkan targetnya yaitu

kategori baik. Kinerja Pelayanan Badan Keuangan tidak terkait dan atau berdampak langsung terhadap NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals).

d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Peluang

- Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- kemudahan berkoordinasi dengan tingkat provinsi dan pusat.
- Adanya pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat, dana subsidi sebagai pendukung pembangunan yang ada di daerah.
- Munculnya Sumber Pajak baru sebagai Pendapatan Asli Daerah
- Terintegrasinya perencanaan dan penganggaran
- Pembinaan kepada Perangkat Daerah melalui fungsi evaluasi perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran

Ancaman/Tantangan

- Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah berkembang sangat cepat, terkadang Adanya peraturan dan kebijakan pemerintah yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan.
- Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.
- Informasi dana transfer dari pusat yang belum pasti dan terlambat, mengakibatkan kecenderungan berubah-ubahnya penyusunan anggaran di daerah
- kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang masih perlu ditingkatkan
- Banyaknya aset yang belum bersertifikasi, legalitas status mengakibatkan kesulitan untuk mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki oleh daerah.

e. Formulasi isu-isu penting berupa dokumentasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- Pengelolaan Keuangan yang tertib masih menjadi isu penting dalam perumusan program dan kegiatan prioritas, sebagai tindaklanjut Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 perihal Implementasi SIPD dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Akuntansi Tahun 2024, maka terjadi perubahan mekanisme dari aplikasi SIPD menjadi aplikasi SIPD RI. Implementasi SIPD sampai dengan Tahun berjalan belum optimal karena masih terkendala teknis dan adanya pembaharuan-pembaharuan. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah ditetapkan tanggal 23 Januari 2023 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal

17 November 2023, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan tertib, efektif dan efisien.

- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dioptimalkan, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi serta sinergi pemungutan Pajak Daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kab/Kota, sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang dan mampu mendorong peningkatan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD perlu dilakukan review karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah Perangkat Daerah harus menyesuaikan pagu anggaran dengan memperhatikan sasaran dan prioritas program, kegiatan mengacu pada indikator dan target kinerja dapat mengakomodir pelaksanaan visi dan misi Kabupaten Ngawi sesuai dengan tugas dan fungsi. Review terhadap Rancangan Awal RKPD sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi

Rancangan awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4		6	2	3	4		6
	KEUANGAN				543.813.634.299,67					465.254.788.972,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100%	22.808.774.124,25	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam setahun	Badan Keuangan	100%	19.228.407.847,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100%	214.192.427,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja OPD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	100%	239.842.500,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Keuangan	100%	24.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Badan Keuangan	100%	33.075.000,00

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Badan Keuangan	11 Dokumen	11.792.427,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Badan Keuangan	11 Dokumen	14.425.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Badan Keuangan	2 Dokumen	6.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Badan Keuangan	2 Dokumen	4.627.500,00
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Badan Keuangan	4 Dokumen	55.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Badan Keuangan	4 Dokumen	5.175.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Badan Keuangan	2 Dokumen	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Badan Keuangan	2 Dokumen	3.465.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan	4 Dokumen	112.400.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Badan Keuangan	4 Dokumen	179.075.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	6 Laporan	19.800.003.697,25	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	6 Laporan	16.068.001.232,00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Badan Keuangan	100%	19.792.003.697,25	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Badan Keuangan	100%	16.061.626.232,00
		Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Badan Keuangan	1120 orang			Jumlah dokumen pengajuan gaji dan tunjangan ASN dan Non ASN yang disusun	Badan Keuangan	1120 orang	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Badan Keuangan	28 Dokumen	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / semesteran SKPD	Badan Keuangan	28 Dokumen	6.375.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	48 Laporan	391.298.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang disiplin dalam setahun	Badan Keuangan	48 Laporan	375.135.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Keuangan	100%	88.148.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Badan Keuangan	100%	71.715.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Keuangan	3 Paket	303.150.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Badan Keuangan	3 Paket	303.420.000,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	Badan Keuang an	150 Orang	712.750.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun	Badan Keuang an	150 Orang	652.847.640,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KOMponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Badan Keuang an	100%	11.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket KOMponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Badan Keuang an	100%	10.096.310,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Badan Keuang an	1 Paket	183.250.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Badan Keuang an	1 Paket	157.124.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Badan Keuang an	1 Paket	14.750.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Badan Keuang an	1 Paket	8.378.330,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Badan Keuang an	3 Paket	115.750.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Badan Keuang an	3 Paket	109.119.000,00
		Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuang an	10 Paket			Jumlah barang yang digandakan	Badan Keuang an	10 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Badan Keuang an	50000 Lembar	126.750.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundang - Undangan yang disediakan	Badan Keuang an	50000 Lembar	136.580.000,00
		Jumlah Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang - Undamgan yang diadakan	Badan Keuang an	5 Dokume n			Jumlah Sosialisasi / Bimtek Peraturan Perundang - Undamgan yang diadakan	Badan Keuang an	5 Dokume n	

	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Badan Keuangan		10.750.000,00	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Badan Keuangan		9.400.000,00
		Jumlah Mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	Badan Keuangan	24 Laporan			Jumlah Mamin Kunjungan Tamu yang disediakan	Badan Keuangan	24 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan keuangan	2000 Kotak	250.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Badan keuangan	2000 Kotak	222.150.000,00
		Jumlah Mamin Rapat SKPD yang disediakan		200 Laporan			Jumlah Mamin Rapat SKPD yang disediakan		200 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Badan keuangan	500 Kotak	360.580.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun	Badan keuangan	500 Kotak	480.085.475,00
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Badan keuangan	100%		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Badan keuangan	100%	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Badan Keuangan	2 Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Badan Keuangan	2 Unit	

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Badan keuangan	1 Unit	34.080.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Badan keuangan	1 Unit	66.908.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan keuangan	7 Unit	293.750.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Badan keuangan	7 Unit	404.677.475,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Badan Keuangan	30 Unit	32.750.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Badan Keuangan	30 Unit	8.500.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	5 Unit	1.084.950.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun	Badan Keuangan	5 Unit	1.150.496.000,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan	100%	3.200.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Badan Keuangan	100%	2.500.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Liatrik yang disediakan	Badan Keuangan	500 Laporan	465.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Liatrik yang disediakan	Badan Keuangan	500 Laporan	492.266.000,00
		Jumlah penambahan daya listrik	Badan Keuangan	60 Laporan			Jumlah penambahan daya listrik	Badan Keuangan	60 Laporan	

		Jumlah pemasangan daya listrik	Badan Keuangan	KWH			Jumlah pemasangan daya listrik	Badan Keuangan	KWH	
		Jumlah Iklan / Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Badan Keuangan	Titik			Jumlah Iklan / Publikasi Media Cetak dan Elektronik	Badan Keuangan	Titik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Badan Keuangan	Kali	16.750.000,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Badan Keuangan	Kali	90.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Badan Keuangan	36 Laporan	600.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Badan Keuangan	36 Laporan	565.730.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	12 Laporan	245.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Badan Keuangan	12 Laporan	262.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	Badan Keuangan	100%	55.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	Badan Keuangan	100%	52.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	Badan Keuangan	1 Unit	79.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinanya	Badan Keuangan	1 Unit	90.000.000,00

	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Badan Keuangan	44 Unit/Tahun	15.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Badan Keuangan	44 Unit/Tahun	10.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badan Keuangan	15 Kali	50.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Badan Keuangan	15 Kali	65.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Badan Keuangan	47 Kali	46.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Badan Keuangan	47 Kali	45.000.000,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu	Badan Keuangan	4 Unit	517.359.875.175,42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu	Badan Keuangan	4 Unit	443.128.474.125,00
		Persentase kepatuhan realisasi anggaran SKPD	Badan Keuangan	100%			Persentase kepatuhan realisasi anggaran SKPD	Badan Keuangan	100%	
2	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu	Badan Keuangan	100%	1.346.648.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu	Badan Keuangan	100%	735.021.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Badan Keuangan	100%	156.514.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Badan Keuangan	100%	85.650.000,00

		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	94 Dokumen			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	94 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Badan Keuangan	4 Kali	159.981.400,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	Badan Keuangan	4 Kali	88.150.000,00
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		94 Dokumen			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		94 Dokumen	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		4 Kali	-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		4 Kali	-
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		92 Dokumen			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		92 Dokumen	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi		6 Kali	-	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi		6 Kali	-
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		92 Dokumen			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		92 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		6 Kali	384.685.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		6 Kali	401.686.000,00

		Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik		2 Dokume n			Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik		2 Dokume n	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		1 Dokume n			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		1 Dokume n	
		Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi		6 Kali			Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi		6 Kali	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			466.157.900,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			133.500.000,00
		Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik	Badan Keuang an	9 Dokume n			Jumlah Dokumen informasi keuangan daerah yang dapat di akses publik	Badan Keuang an	9 Dokume n	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuang an	1 Dokume n			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuang an	1 Dokume n	
		Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuang an	4 Kali			Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	Badan Keuang an	4 Kali	
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran	Badan Keuang an		179.310.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang anggaran	Badan Keuang an		26.035.000,00

		Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Dokumen			Jumlah Koordinasi Penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran yang dilaksanakan	Badan Keuangan	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	2 Kali	986.229.500,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	2 Kali	1.006.229.500,00
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan	94%	179.295.500	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Badan Keuangan	94%	191.040.000
		Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan	264 Laporan			Persentase SILPA terhadap APBD	Badan Keuangan	264 Laporan	
	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	0,70%	5.580.000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	0,70%	3.069.000
		Persentase SILPA terhadap APBD		1 Laporan			Persentase SILPA terhadap APBD		1 Laporan	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Keuangan	6,70%	497.735.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Badan Keuangan	6,70%	351.255.500
		Jumlah SP2D yang diterbitkan		15300 Dokumen			Jumlah SP2D yang diterbitkan		15300 Dokumen	

		Jumlah SPD yang diterbitkan	Badan Keuangan				Jumlah SPD yang diterbitkan	Badan Keuangan		
		Jumlah SPM yang diterbitkan					Jumlah SPM yang diterbitkan			
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer lainnya			67.816.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Tranfer lainnya			22.859.000
		Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer) yang disusun		42 Dokumen			Jumlah LKT (Laporan Konfirmasi Transfer) yang disusun		42 Dokumen	
		Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Tarnsfer yang disusun	Badan Keuangan				Jumlah Laporan dan Koordinasi Dana Tarnsfer yang disusun	Badan Keuangan		
	Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank				Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank			3.022.500

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran Kas dan pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4 Dokumen	107.432.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan laporan hasil Koordinasi dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas daerah, Laporan Aliran Kas dan pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		4 Dokumen	95.842.000
		Jumlah Laporan Gaji		478 Laporan			Jumlah Laporan Gaji		478 Laporan	
		Jumlah Rekonsiliasi gaji	Badan Keuangan				Jumlah Rekonsiliasi gaji	Badan Keuangan		
		Persentase Belanja guru Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	Badan Keuangan				Persentase Belanja guru Pegawai diluar Guru dan Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah APBD	Badan Keuangan		

		Jumlah Laporan Kas dan Perkiraan Belanja yang disusun	Badan Keuang an				Jumlah Laporan Kas dan Perkiraan Belanja yang disusun	Badan Keuang an		
		Jumlah SKPP yang diterbitkan					Jumlah SKPP yang diterbitkan			
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Badan Keuang an		53.371.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	Badan Keuang an		23.325.500
		Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan		270 Dokume n			Jumlah Rekonsiliasi BKU yang dilaksanakan		270 Dokume n	
		Jumlah Rekonsiliasi DTH / RTH yang dilaksanakan	Badan Keuang an				Jumlah Rekonsiliasi DTH / RTH yang dilaksanakan	Badan Keuang an		
		Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan					Jumlah Rekonsiliasi Posisi Kas dengan Bank Jatim yang dilaksanakan			
		Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan					Jumlah Rekonsiliasi SPJ Fungsional yang dilaksanakan			
		Jumlah Rekonsiliasi dengan SKPD					Jumlah Rekonsiliasi dengan SKPD			

	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Keuangan		75.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Keuangan		315.816.000
		Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota		188 Orang			Jumlah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota		188 Orang	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan Sesuai SAP			1.084.470.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan Sesuai SAP			1.020.275.000,00
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		100%	142.955.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		100%	132.760.000,00

		Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuang an	144 Laporan			Jumlah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial yang dilakukan	Badan Keuang an	144 Laporan	
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban , Ekuitas, Pendapatan , Belanja, Pembiayaan , Pendapatan - LO, dan Beban		16000 Kali	126.943.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen hasil rekonsiliasi dan Verifikasi Aset , Kewajiban , Ekuitas, Pendapatan , Belanja, Pembiayaan , Pendapatan - LO, dan Beban		16000 Kali	161.730.000,00
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun		732 Dokumen	168.620.000,00	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang disusun		732 Dokumen	80.000.000,00
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi		18 Kali		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi		18 Kali	73.110.000,00
		Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana		134 Dokumen			Persentase Program Kegiatan yang tidak terlaksana		134 Dokumen	

		Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD		10,00%			Persentase Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD		10,00%	
		Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	1%			Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	Badan Keuangan	1%	
		Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik		0.1%			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik		0.1%	
		Jumlah Dokumen yang dapat di akses publik thd informasi keuangan Daerah		2 Kali			Jumlah Dokumen yang dapat di akses publik thd informasi keuangan Daerah		2 Kali	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota		1Dokumen	205.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota		1Dokumen	118.005.000,00
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		9 Dokumen	75.000.000,00	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		9 Dokumen	38.776.000,00
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah		2 Dokumen	119.758.000,00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah		2 Dokumen	151.460.000,00

	Daerah	Daerah				Daerah	Daerah			
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota		5 Dokumen	246.194.000,00	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota		5 Dokumen	264.434.000,00
		Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan		60 Orang			Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah yang dilaksanakan		60 Orang	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Fasilitas Belanja Keuangan Daerah sesuai Prosedur	Badan Keuangan		513.885.526.875,42	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Fasilitas Belanja Keuangan Daerah sesuai Prosedur	Badan Keuangan		440.083.321.125,00
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan	100%	491.598.924.475,42	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Badan Keuangan	100%	423.336.776.125
		persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)	Badan Keuangan	852 Laporan			persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer Expenditures)	Badan Keuangan	852 Laporan	

		Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	1%			Jumlah desa yang mendapatkan ADD	Badan Keuangan	1%	
		Jumlah Desa yang Mendapat SAPRAS	Badan Keuangan				Jumlah Desa yang Mendapat SAPRAS	Badan Keuangan		
		Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan				Jumlah RT yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RT	Badan Keuangan		
		Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW					Jumlah RW yang mendapatkan Bantuan Keuangan Insentif RW			
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			11.411.630.000,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			8.000.000.000,00
		Jumlah SP2D yang diterbitkan		10 Laporan			Jumlah SP2D yang diterbitkan		10 Laporan	
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota		10 Dokumen	10.874.972.400,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota		10 Dokumen	8.746.545.000,00

		Jumlah SP2D yang diterbitkan		10 Laporan			Jumlah SP2D yang diterbitkan		10 Laporan	
		Persentase Jumlah Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa yang dikelola	Badan Keuangan	10 Dokumen			Persentase Jumlah Bagi Hasil Kabupaten / Kota dan Desa yang dikelola	Badan Keuangan	10 Dokumen	
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase SKPD yang Mengimplementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan penganggaran Daerah	Badan Keuangan	100%	57.000.000,00	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Prosentase SKPD yang Mengimplementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan penganggaran Daerah	Badan Keuangan	100%	283.627.500,00
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan	100%	57.000.000,00	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Badan Keuangan	100%	77.627.500,00

	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Keuangan	1 Dokumen		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Badan Keuangan	1 Dokumen	206.000.000,00
		Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		92 Orang			Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		92 Orang	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terdata dan layak	Badan Keuangan		1.200.838.500,00	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terdata dan layak	Badan Keuangan		1.090.838.500,00
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	95%	1.200.838.500,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu	Badan Keuangan	95%	1.090.838.500,00
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang disusun	Badan Keuangan	100%	125.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standart Harga yang disusun	Badan Keuangan	100%	44.907.000,00
		Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSH	Badan Keuangan	1 Dokumen			Jumlah SKPD yang menyampaikan usulan SSH	Badan Keuangan	1 Dokumen	

		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	47 SKPD			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	47 SKPD	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	6 Kali	55.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	6 Kali	37.465.000
		Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	Badan Keuangan	47 Dokumen			Jumlah SKPD yang menyampaikan RKBMD	Badan Keuangan	47 Dokumen	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	47 SKPD			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	47 SKPD	
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	6 Kali		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	6 Kali	41.254.000
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1 Dokumen			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuangan	1 Dokumen	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			180.515.874	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			165.872.500
		Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Laporan			Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1 Laporan	

		Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Badan Keuang an				Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Badan Keuang an		
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD					Jumlah Koordinasi Dengan SKPD			
3	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Badan Keuang an			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Badan Keuang an		46.162.000
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuang an	5 Laporan			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD	Badan Keuang an	5 Laporan	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Keuang an		300.689.961	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Badan Keuang an		222.444.500
		Jumlah Dokumen asli Kepemilikan BMD yang disimpan		4 Laporan			Jumlah Dokumen asli Kepemilikan BMD yang disimpan		4 Laporan	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		2 Dokume n			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		2 Dokume n	

	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	6 Kali	277.378.922	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Keuangan	6 Kali	189.547.000
		Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik		5 Dokumen			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik		5 Dokumen	
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		3 Kali			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		3 Kali	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		6 Kali	28.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		6 Kali	74.008.500
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		4 Laporan			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		4 Laporan	
		Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	6 Kali			Jumlah Rekonsiliasi BMD yang dilaksanakan	Badan Keuangan	6 Kali	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			134.253.743	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			44.575.500
		Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		47 Laporan			Jumlah Koordinasi Dengan SKPD		47 Laporan	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota		6 Kali	100.000.000,00	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota		6 Kali	224.602.500,00

		Jumlah SKPD yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan yang dilaksanakan		47 orang			Jumlah SKPD yang Menindaklanjuti Hasil Pembinaan yang dilaksanakan		47 orang	
		Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan		47 SKPD			Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan		47 SKPD	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan		2.444.146.500,00	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Keuangan		1.807.068.500,00
	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan yang dilaksanakan		100%	2.444.146.500,00	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan yang dilaksanakan		100%	1.807.068.500,00
	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		100%	77.785.000,00	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah		100%	35.905.000,00
		Jumlah Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan	Badan Keuangan	8 Dokumen			Jumlah Fasilitasi dan koordinasi kegiatan Perencanaan Pendapatan	Badan Keuangan	8 Dokumen	
		Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan		10 Kali			Jumlah pendampingan Aplikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan		10 Kali	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		2 Kali	73.695.000,00	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah		2 Kali	235.211.000,00
		Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	Badan Keuangan	3 Dokumen			Jumlah Peserta Bimtek Pengelolaan Pajak yang diselenggarakan	Badan Keuangan	3 Dokumen	

		Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Daerah yang dilaksanakan		35 Orang			Jumlah Koordinasi tentang Pengembangan Daerah yang dilaksanakan		35 Orang	
	Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				Penyuluhan dan penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			
		Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	12 laporan			Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik	Badan Keuangan	12 laporan	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Keuangan	12 Kali	1.096.735.000,00	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Badan Keuangan	12 Kali	6.310.000,00
		Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah yang disurve	Badan Keuangan	500 Laporan			Jumlah Potensi Wajib Pajak Daerah yang disurve	Badan Keuangan	500 Laporan	
		Jumlah Obyek Pajak Daerah Yang didata dan didaftarkan					Jumlah Obyek Pajak Daerah Yang didata dan didaftarkan			
4		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyrk Pajak daerah	Badan Keuangan				Jumlah Dokumen Pendataan dan Pendaftaran Obyrk Pajak daerah	Badan Keuangan		

	Pengelolaan , Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan , Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Keuang an		31.060.000,00	Pengelolaan , Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan , Pemeliharaan , dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Badan Keuang an		10.090.000,00
		Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara	Badan Keuang an	12 Laporan			Jumlah aplikasi pajak daerah yang dipelihara	Badan Keuang an	12 Laporan	
		Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah yang dilaksanakan		2 Aplikasi			Jumlah Pemeriksaan Obyek Pajak Daerah yang dilaksanakan		2 Aplikasi	
		Jumlah Monitoring Pendapatan daerah dan PBB yang dilaksanakan					Jumlah Monitoring Pendapatan daerah dan PBB yang dilaksanakan			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Badan Keuang an		100.950.000,00	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Badan Keuang an		872.600.000,00
		Jumlah DHKP, SPPT, yang dicetak		1 Dokumen			Jumlah DHKP, SPPT, yang dicetak		1 Dokumen	
		Jumlah Himbauan Pajak yang dicetak					Jumlah Himbauan Pajak yang dicetak			
		Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	Badan Keuang an				Jumlah Obyek Pajak yang ditetapkan	Badan Keuang an		
		Jumlah Pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan					Jumlah Pendampingan Penetapan Wajib Pajak Daerah yang dilaksanakan			
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak daerah			37.990.000,00	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak daerah			24.225.000,00

	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		40 Layanan	100.437.500	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi		40 Layanan	38.025.000
		Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	7 Dokumen			Persentase Deviasi realisasi PAD thd anggaran PAD dalam APBD yang disusun tepat waktu	Badan Keuangan	7 Dokumen	
		Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan tepat Waktu		0,80%			Jumlah Laporan Pendapatan Daerah yang disampaikan tepat Waktu		0,80%	
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			220.000.000	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			91.102.500
		Jumlah Kegiatan Intensifikasi / Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan		240 Dokumen			Jumlah Kegiatan Intensifikasi / Penagihan Pajak Daerah yang dilaksanakan		240 Dokumen	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Keuangan		705.494.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Badan Keuangan		493.600.000
		Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang di Publikasikan di Wabsite		8 Dokumen			Jumlah Dokumen Realisasi PBB yang di Publikasikan di Wabsite		8 Dokumen	
		Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik		1 Dokumen			Jumlah Publikasi yang dilaksanakan untuk Transparasi dan Partisipasi Publik		1 Dokumen	

		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1kali			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan	Badan Keuangan	1kali	
--	--	--	----------------	-------	--	--	--	----------------	-------	--

BAB III

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, yaitu “Indonesia Berpenghasilan MenengahTinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”, kemudian RPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan dan tetap pula memperhatikan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2025, yaitu Terwujudnya Kabupaten Ngawi Sejahtera dengan Bertumpu pada Potensi Pertanian, Industri dan Perdagangan yang Maju dan Berkelanjutan”. Sebagai upaya keselarasan dan sinergi dalam upaya pembangunan daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026 yaitu : **SEMESTA BERENCANA** “*Terwujudnya masyarakat Kabupaten Ngawi yang mandiri, berakhlak, makmur dan berdaya saing berbasis agropolitan dengan semangat gotong royong dalam bingkai NKRI*”.

Tema Pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2025 adalah : “Mempercepat pemerataan pembangunan dan mengembangkan perekonomian berbasis pertanian berkelanjutan”. Selanjutnya tema pembangunan di atas kan diterjemahkan melalui beberapa prioritas pembangunan Kabupaten Ngawi tahun 2025, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan daya saing SDM melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan;
- b. Peningkatan perekonomian daerah melalui nilai tambah pertanian;
- c. Penurunan tingkat kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pemantapan infrastruktur wilayah guna kemudahan distribusi dan peningkatan nilai tambah pertanian;
- e. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kepuasan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi yang optimal

3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD

Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk mewujudkan dan sebagian pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektivitas yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi. Mengacu Pada Visi dan

Misi RPJMD Kabupaten Ngawi 2021-2026, Badan Keuangan bertanggungjawab Mendukung Misi Ke 3 Yaitu Meningkatkan etos kerja dan integritas aparatur pemerintahan guna memberikan pelayanan prima. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan Tujuan dan sasaran Badan Keuangan ;

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target 2025
1	Meningkatkan Kapasitas Tata kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (peringkat Baik)	75,25
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap APBD	13,08%
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kategori Tertib	98,50%
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Kategori Tertib	95,20%
2.	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	89,5

Program Kegiatan

Progam adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sararan dan tujuan Pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai penjabaran dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.Sub Kegiatan adalah penjabaran dari proses atau aktivitas pelaksanaan kegiatan.

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3	5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4	5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5	5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6	5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
1	5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2	5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
6	5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7	5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	5.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan
2	5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3	5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
4	5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	5.02.01.2.07. 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	5.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
4	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5	5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6	5.02.01.2.09. 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	5.02.01.2.09. 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
1	5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2	5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3	5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4	5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5	5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6	5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7	5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8	5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

9	5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
1	5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
2	5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3	5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
4	5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
5	5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
6	5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
7	5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
8	5.02.02.2.02. 0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
2	5.02.02.2.03.0002 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
3	5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
4	5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
5	5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
6	5.02.02.2.03.0008 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
7	5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
8	5.02.02.2.03. 0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2	5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
3	5.02.02.2.04. 0010 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
1	5.02.02.2.05.0002 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemda Bidang Keuangan Daerah

2	5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	
1	5.02.03.2.01.0001 Penyusunan SSH
2	5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3	5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
4	5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah
5	5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah
6	5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah
7	5.02.03.2.01. 0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
8	5.02.03.2.01. 0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
9	5.02.03.2.01. 0012 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
10	5.02.03.2.01. 0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	
1	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan pengelolaan pajak daerah
2	5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3	5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4	5.02.04.2.01.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana PengelolaanPajak Daerah
5	5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6	5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7	5.02.04.2.01. 0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah
8	5.02.04.2.01. 0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
9	5.02.04.2.01. 0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10	5.02.04.2.01. 0011 Penagihan Pajak Daerah
11	5.02.04.2.01. 0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
12	5.02.04.2.01. 0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Keuangan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut ;

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
 - Pagu indikatif dan pemetaan program prioritas pada ranwal RKPD Tahun 2025.
 - Kesesuaian dengan Tugas pokok fungsi yang diampu Badan Keuangan.
- b. Uraian garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan
 - 4 Program, 14 kegiatan, dan 74 sub kegiatan dengan total pagu indikatif yaitu Rp.465.254.788.972,00
- c. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
 - Sudah sesuai
- d. Tabel dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Badan Keuangan 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Ngawi

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (n+1)	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
						BADAN KEUANGAN				465.254.788.972,00				554.109.054.061,91
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				465.254.788.972,00				554.109.054.061,91
	5	0				KEUANGAN				465.254.788.972,00				554.109.054.061,91
1	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-			20.950.353.972,00			-	23.037.969.340,91
	5	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			239.842.500,00			-	315.900.000,00

	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	33.075.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			24.500.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	14.425.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			75.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4.627.500,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			7.500.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	5.175.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			8.500.000,00

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.465.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			6.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	179.075.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			194.400.000,00
	5	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100 %	17.789.947.357,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		-	19.920.678.840,91
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1120 Orang/bulan	17.783.572.357,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			19.912.678.840,91

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	48 Laporan	6.375.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			8.000.000,00
	5	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dipenuhi dalam setahun		100 %	375.135.000,00			-	412.800.000,00
	5	0	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	71.715.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			89.600.000,00

	5	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	303.420.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			323.200.000,00
	5	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum dalam setahun		100 %	652.847.640,00			-	725.500.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	10.096.310,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00

	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	157.124.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			183.500.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	8.378.330,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Paket	109.119.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			116.000.000,00

	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	136.580.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			127.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	9.400.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			11.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	222.150.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			258.000.000,00

	5	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam setahun		100 %	480.085.475,00			-	366.740.500,00
	5	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	66.908.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			35.040.500,00
	5	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Unit	404.677.475,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			293.850.000,00

	5	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	8.500.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			37.850.000,00
	5	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam setahun		100 %	1.150.496.000,00			-	1.085.350.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Laporan	2.500.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			4.500.000,00

	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	492.266.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			465.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	90.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			0,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	565.730.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			615.850.000,00

	5	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dalam setahun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %	262.000.000,00			-	211.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	52.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			80.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Unit	90.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			55.000.000,00

	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	10.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Unit	65.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			15.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	45.000.000,00	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)			46.000.000,00

2	5	0 2	0 2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Dokumen Penetapan APBD dan PAPBD yang ditetapkan tepat waktu		100 %	441.406.528.000,00			-	526.837.240.221,00
	5	0 2	0 2	2.0 1		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran yang disusun Tepat Waktu		100 %	735.021.000,00			-	1.446.648.800,00
	5	0 2	0 2	2.0 1	000 1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94 Dokumen	85.650.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			155.963.000,00

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	94 Dokumen	88.150.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			159.981.400,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	401.686.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			485.237.500,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	133.500.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			466.157.400,00

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	26.035.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			179.309.500,00
	5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu		100 %	1.006.229.500,00			-	1.186.229.500,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	264 Dokumen	191.040.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			192.299.500,00

	5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	1 Laporan	3.069.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			7.580.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	15300 Dokumen	351.255.500,00	PENDAPAT AN TRANSFER			642.735.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	42 Dokumen	22.859.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			67.816.000,00

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	3.022.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			25.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	478 Laporan	95.842.000,00				137.428.000,00
	5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Dokumen	23.325.500,00	PENDAPATAN TRANSFER			38.371.000,00

	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	88 Orang	315.816.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			75.000.000,00
	5	0	0	2.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase PD yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tepat waktu dan Sesuai SAP		100 %	1.020.275.000,00			-	1.259.470.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	144 Laporan	132.760.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			142.955.000,00

	5	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	732 Dokumen	161.730.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			126.943.000,00
	5	0	0	2.0	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Laporan	80.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			228.620.000,00
	5	0	0	2.0	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		73.110.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			75.000.000,00

	5	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	118.005.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			205.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	38.776.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			75.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	151.460.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			119.758.000,00

	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Orang	264.434.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			286.194.000,00
	5	0	0	2.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Pelaksanaan Fasilitas Belanja Keuangan Daerah sesuai Prosedur		100 %	438.361.375.000,00			-	522.680.347.921,00
	5	0	0	2.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	852 Laporan	421.614.830.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			499.569.549.767,00

	5	0	0	2.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	8.000.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			11.411.630.000,00
	5	0	0	2.0	001	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Laporan	8.746.545.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			11.699.168.154,00
	5	0	0	2.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mengimplementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam penyusunan penganggaran Daerah		100 %	283.627.500,00			-	264.544.000,00

	5	0	0	2.0	000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	77.627.500,00	PENDAPATAN TRANSFER			57.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	65 Orang	206.000.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			207.544.000,00
3	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang terdata dan layak		95 %	1.090.838.500,00			-	1.409.745.500,00

	5	0	0	2.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan/ Dokumen Barang Milik Daerah yang disusun dan disampaikan tepat waktu		100 %	1.090.838.500,00			-	1.409.745.500,00
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	44.907.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			154.907.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Dokumen	37.465.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			68.404.600,00

	5	0	0	2.0	000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	41.254.000,00	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM			45.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	165.872.500,00	PENDAPAT AN TRANSFER			178.000.000,00
	5	0	0	2.0	000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	46.162.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			48.000.000,00

	5	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	222.444.500,00	PENDAPATAN TRANSFER			325.000.000,00
	5	0	0	2.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	189.547.000,00	PENDAPATAN TRANSFER			300.000.000,00
	5	0	0	2.0	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Laporan	44.575.500,00	PENDAPATAN TRANSFER			145.433.900,00

	5	0	0	2.0	001	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	47 Orang	224.602.500,00	PENDAPATAN TRANSFER			100.000.000,00
4	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		100 %	1.807.068.500,00			-	2.824.099.000,00
	5	0	0	2.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan yang dilaksanakan		100 %	1.807.068.500,00			-	2.824.099.000,00

	5	0	0	2.0	000	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	35.905.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			108.145.000,00
	5	0	0	2.0	000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	235.211.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			86.715.000,00
	5	0	0	2.0	000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	0	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa		10.090.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			31.160.000,00

	5	0	0	2.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	40 Layanan	24.225.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			37.990.000,00
	5	0	0	2.0	001	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	38.025.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			100.437.500,00
	5	0	0	2.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	240 Dokumen	91.102.500,00	PENDAPAT AN TRANSFER			365.000.000,00

	5	0	0	2.0	001	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab. Ngawi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8 Dokumen	493.600.000,00	PENDAPAT AN TRANSFER			855.416.500,00
								J U M L A H			465.254.788.972,00			554.109.054.061,91

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam melaksanakan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Program Kegiatan disinkronkan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan serta visi misi Pemerintah Kabupaten Ngawi 2021 - 2026 serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2025. Renja Badan Keuangan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

- a. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan
 - i. Renja Badan Keuangan ini sebagai dasar dalam penyusunan usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, selain itu, Renja Badan Keuangan Tahun 2025 juga memiliki fungsi evaluative terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun sebelumnya.
 - ii. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan maka perlu dilakukan pemetaan kembali terhadap skala prioritas indikator kinerja, untuk kemudian dijadikan dasar pengusulan tambahan pagu pada APBD Tahun berjalan atau APBD Tahun selanjutnya.

b. Kaidah Pelaksanaan

Renja Badan Keuangan dilaksanakan dengan memperhatikan :

- i. Menjaga konsistensi antara perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dengan pelaksanaan serta dokumen perencanaan;
- ii. Merumuskan program dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan;
- iii. Merencanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- iv. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung target capaian program dan kegiatan yang telah disusun;
- v. Menentukan indikator kinerja dan tingkat capaian strategis.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan , maka rekomendasi untuk pengelola keuangan Tahun 2025 sebagai berikut :

- i. Melakukan verifikasi dan pendampingan kepada para pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan;
- ii. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi antar pegawai, antar bidang dan antar Perangkat Daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan keuangan dan Barang Milik Daerah;

- iii. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja yang dijabarkan dengan mewujudkan dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan pada masing-masing bidang.

Dengan tersusunnya Renja Badan Keuangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna serta semua pihak memiliki satu persepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Akhir kata semoga Renja Badan Keuangan Kabupaten Ngawi ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO